

Analisis Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2024

Usni Majida Hasibuan^{1*}, Wina Adelia Lubis², Tengku Della Angrilla³, Yenni Samri Julianti Nasution⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author: majidahhasibuan82@gmail.com

*Correspondence: majidahhasibuan82@gmail.com | Submission Received: 05-05-2025; Revised: 01-06-2025; Accepted: 10-06-2025; Published: 30-06-2025

Abstract

This study aims to analyze the impact of Fiscal policy on Indonesia's economic growth in 2024. The data used comes from the official publication of the Ministry of Finance and Central Statistics. The research method includes analysis of historical data and economic forecasts, as well as the use of macroeconomic models to measure the effects of different tax policies. The data used comes from official sources such as the Central Bureau of Statistics (BPS) and Bank Indonesia (BI), as well as state transactions. Effective and sustainable fiscal policy is needed to support stable and sustainable economic growth in Indonesia. This report is expected to be a reference for political decisions in the language of optimal financial strategies to support Indonesia's economic growth.

Keywords: *Fiscal Policy, Economic Growth, Government Spending*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Fiskal pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Data yang digunakan berasal dari publikasi resmi kementerian keuangan dan statistik pusat. Metode penelitian ini mencakup analisis data historis dan perkiraan ekonomi, serta penggunaan model ekonomi makro untuk mengukur efek kebijakan pajak yang berbeda. Data yang digunakan berasal dari sumber resmi seperti Biro Statistik Pusat (BPS) dan Bank Indonesia (BI), serta transaksi negara. Kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan berkelanjutan. Laporan ini diharapkan menjadi referensi untuk keputusan politik dalam bahasa strategi keuangan yang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah*

INTRODUCTION

Salah satu komponen penting dalam ekonomi makro secara keseluruhan adalah pertumbuhan ekonomi, yang merujuk pada proses perbaikan kondisi ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Suatu negara dikatakan mengalami peningkatan ekonomi jika terjadi perubahan yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonominya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Peningkatan ini ditunjukkan oleh peningkatan

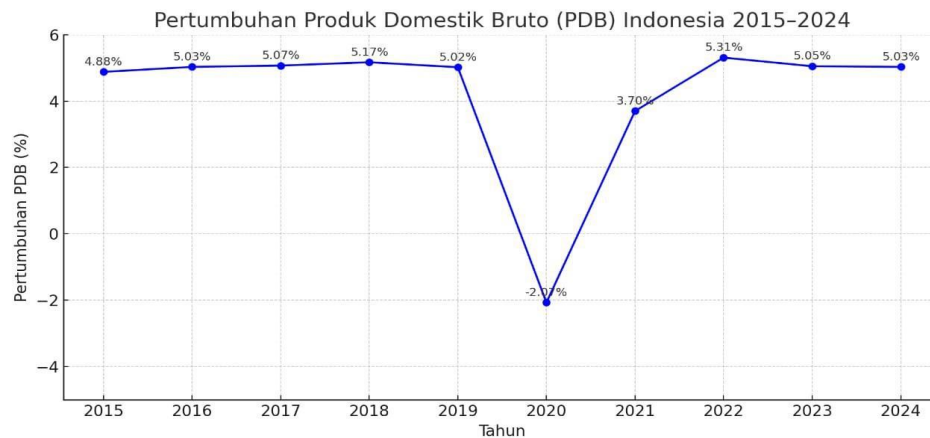
produksi barang industri dan jasa, peningkatan produksi barang modal, dan peningkatan infrastruktur nasional. Salah satu faktor ekonomi makro yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi.

Proses perbaikan kondisi ekonomi suatu negara selama waktu tertentu disebut pertumbuhan ekonomi. Jika kondisi ekonomi suatu negara mengalami perubahan dan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dari sebelumnya, perekonomian negara tersebut dianggap mengalami peningkatan. Menurut Yuniwinsah dan Anis (2018), peningkatan produksi barang industri, sektor jasa, produksi barang modal, dan peningkatan infrastruktur adalah semua tanda pertumbuhan ekonomi yang positif.

Menurut Iskandar (2013), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional bersama dengan pendapatan perkapita dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2011).

Salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian suatu Negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang sering dianggap sebagai pengukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah untuk menggabungkan kegiatan ekonomi dalam PDB selama periode waktu tertentu. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dapat dilihat dalam dua cara. Yang pertama adalah sebagai pendapatan total dari setiap individu yang terlibat dalam perekonomian suatu Negara; yang kedua adalah sebagai pengeluaran total terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu Negara (Mankiw, 2006).

Indonesia yang merupakan sebuah negara sedang berkembang pastinya memiliki perkembangan yang dinamis dalam aspek ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan antara tahun 2015 hingga 2024.



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Fenomena pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam dekade terakhir ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi ekonomi secara makro ini terlihat dari berbagai kemajuan data-data ekonomi makro yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan pemerintah, di mana kebijakan fiskal adalah salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006). Kebijakan fiskal adalah proses pengambilan pajak (penerimaan) dan pengeluaran oleh masyarakat atau negara untuk menekan perubahan siklus bisnis dan ekonomi. Ini berfungsi untuk stabilisasi pertumbuhan ekonomi, memastikan penggunaan tenaga kerja yang optimal, dan menjaga negara dari tingkat inflasi dan pengangguran tinggi (Samuelson, 2005).

Berbagai perubahan dalam pengelolaan anggaran pemerintah, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah, menunjukkan dinamika perkembangan kebijakan fiskal (Sriyana, 2012). Ada dua jenis kebijakan fiskal:

kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif dibuat untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi.

Jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih besar daripada kebutuhannya menyebabkan inflasi tinggi. Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk menurunkan pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga uang beredar yang berasal dari aliran dana pemerintah ke proyek-proyek dapat dikurangi. Untuk mencapai tujuan ini, tarif pajak dinaikkan, sehingga jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat berkurang.

Namun, ketika ekonomi sedang lesu, dengan tingkat pengangguran tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, kebijakan fiskal yang lebih besar digunakan. Untuk mendorong perekonomian, kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan mengubah

pengeluaran negara dan penerimaannya, seperti pajak dan utang internasional, serta menurunkan tarif pajak.

Pajak adalah salah satu instrumen fiskal dan politik yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Dr. So-Parran Soemahamidjaja, kontribusi wajib dalam bentuk dana atau barang yang ditemukan di otoritas di bawah norma hukum adalah untuk menutupi biaya barang dan jasa kolektif ketika mencapai kehadiran yang memadai.

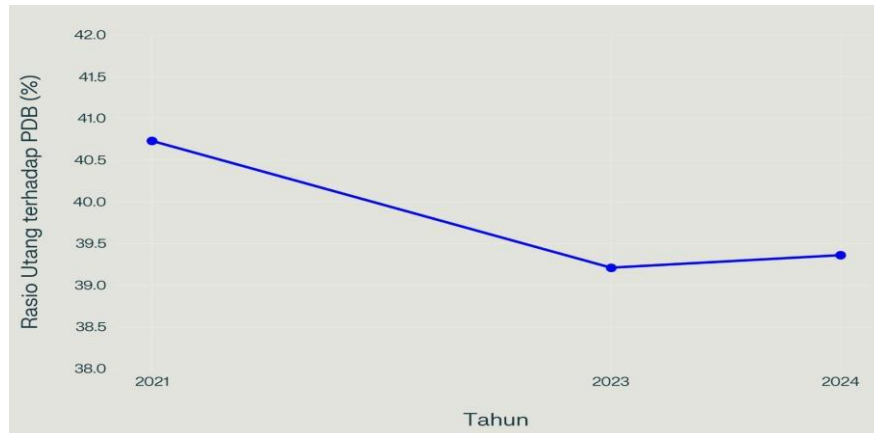
Pajak berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Jika pendapatan nasional dari sektor pajak tinggi dapat didistribusikan ke banyak program strategis. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditentukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumaryani (2019) menjelaskan bahwa pendapatan pajak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sihaloho (2020) juga menjelaskan dampak pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Saragih (2018) menjelaskan dampak dari pendapatan pajak negara pada pertumbuhan ekonomi regional, sehingga pendapatan pajak digunakan untuk wilayah untuk mendanai proyek produksi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Secara finansial, tidak hanya pajak yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghabiskan karyawan untuk pertumbuhan ekonomi (Pusporini, 2020).

Demikian pula, pengeluaran per kapita dan persentase per kapita dari pekerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Widastuti dan Sutristini, 2022). Variabel penjualan dan penjualan minyak dan gas. Pajak memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia-Patnasari (2015). Peran positif pengeluaran nasional untuk pertumbuhan ekonomi juga dijelaskan (Solikin, 2018).

Peningkatan kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif pada PDB. Sementara itu, dampak kenaikan pajak mempengaruhi PDB (Surjaningsih et al., 2012). Ini mengikuti temuan teori Keynes tentang peran pemerintah dalam pergeseran ekonomi dan beberapa studi empiris di negara - negara maju di mana dampak pengeluaran negara lebih dominan daripada dalam pajak.

Utang, atau utang luar negeri, adalah instrumen kebijakan fiskal tambahan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dan meningkatkan ekonomi negara. Pengeluaran dan penerimaan pajak pemerintah pusat dipengaruhi oleh utang luar negeri (Rusydi, 2014). Selain itu, hutang asing menguntungkan pertumbuhan ekonomi, terutama selama pandemi (Cahyani et al., 2021).

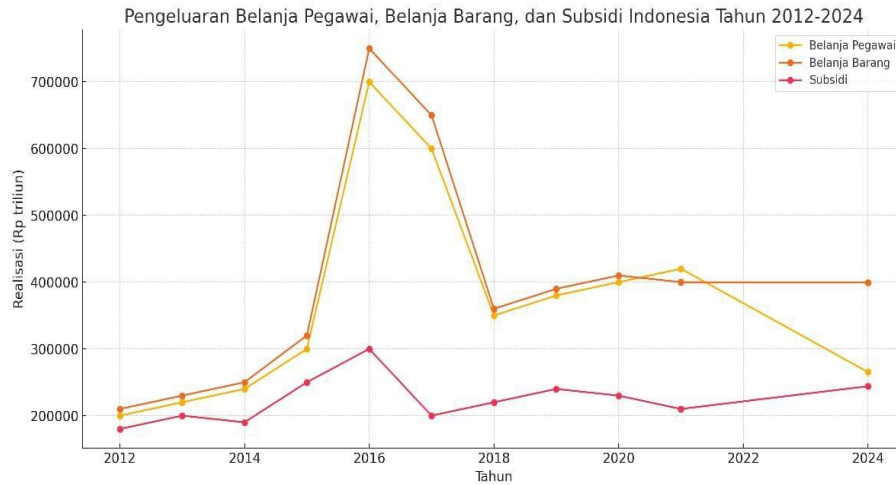
Dengan bantuan dana asing, negara dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio utang luar negeri Indonesia meningkat sebagai akibat dari penerapan kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rasio utang luar negeri sejak 2021-2024.



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Selain itu, ada langkah-langkah keuangan dan politik yang terkait dengan pengeluaran negara, termasuk karyawan, pengeluaran barang dagangan dan subsidi. Kebijakan bersubsidi yang diterapkan oleh pemerintah selalu mengarah pada pendapat orang tentang kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang berpendapat bahwa subsidi tidak sehat, jadi hibah harus menghapuskan anggaran negara, tidak peduli bagaimana pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih untuk mengatasi masalah kegagalan pasar (Munawar, 2013). Namun, kebijakan subsidi masih dianggap sebagai insentif untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertahankan pengeluaran negara, pemerintahan yang stabil dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Subsidi menguntungkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (Ngaisa dan Indrawati, 2021), jadi kebijakan bersubsidi harus dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Putri, 2019). Dampak pengeluaran negara skala besar diperdebatkan. Pernyataan pertama menyatakan bahwa pengeluaran negara pada harus dibatasi sehingga biaya tidak melebihi pertumbuhan ekonomi di atas pernyataan pertama memberikan integrasi keuangan. Ini akan mengurangi target defisit rumah tangga tanpa khawatir tentang hal itu memiliki dampak negatif pada ekonomi. Pendapat kedua menyatakan bahwa pengeluaran negara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menggunakannya sebagai salah satu dari kebijakan fiskal.



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

LITERATURE REVIEW

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu alat yang paling penting untuk mengatur perekonomian suatu negara. Menurut Mankiw (2016), kebijakan fiskal mencakup keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) biasanya digunakan untuk membuat kebijakan fiskal di Indonesia, yang menunjukkan rencana pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Analisis kebijakan fiskal mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah telah memanfaatkan APBN sebagai alat kebijakan fiskal untuk mempertahankan kestabilan ekonomi, meningkatkan investasi, serta mempercepat perubahan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif.

Kebijakan fiskal yang Diterapkan yaitu pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi pengeluaran negara, khususnya dalam hal belanja modal dan barang, untuk memperkuat infrastruktur serta mendukung pengembangan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan hasil positif, sementara penurunan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan dengan menerapkan strategi diversifikasi dalam sumber pendapatan. Kerja sama antara APBN dan APBD diperkuat untuk mendukung kestabilan ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Dampak Kebijakan Fiskal yaitu ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang

signifikan sebesar 5,03% pada tahun 2024, yang dipicu oleh konsumsi domestik yang stabil, peningkatan investasi, dan perbaikan dalam kinerja ekspor. Inflasi tetap terkendali dan kesejahteraan masyarakat membaik, ditandai dengan penurunan jumlah pengangguran serta kemiskinan. Ketahanan pangan juga menunjukkan kemajuan yang baik dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mencapai 83,80 pada 2023, menempatkan Indonesia dalam kategori "Sangat Tahan".

Sedangkan tantangan dan peluang yaitu Pemerintah harus memperbaiki kualitas investasi di sektor-sektor yang produktif dan memperkuat kebijakan yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Peningkatan peran sektor tersier dan pengembangan ekonomi lokal juga menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal yang dapat beradaptasi dan berbasis data akan membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Pertumbuhan Ekonomi

Fokus utama upaya pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan tujuan meningkatkan output. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing negara. Dalam jangka panjang, tujuan pertumbuhan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Produksi per kapita terdiri dari tiga komponen utama: proses, produksi per kapita, dan perencanaan jangka panjang. Dengan demikian, kontribusi pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup jumlah produksi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan setiap orang dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dinamis yang menunjukkan bagaimana perekonomian berkembang atau berubah seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, itu bukanlah representasi statis dari kondisi ekonomi pada satu titik waktu. Fokusnya adalah evolusi atau perubahan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan atau daya tahan suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi untuk kebutuhan penduduknya dalam jangka panjang, yang dapat terpenuhi melalui kemajuan atau penyesuaian.

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total produksi atau output yang dihasilkan oleh pemerintah, yang menunjukkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Metode ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Salah satu indikator utama dalam pembangunan ekonomi regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merangkum nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu, tanpa memperhitungkan aspek kepemilikan. PDRB memungkinkan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Dengan menggunakan harga konstan, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Ada tiga pendekatan yang berbeda untuk menghitung PDRB, menurut BPS. Mereka adalah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Perencanaan keuangan yang matang, APBN mengelola semua hak dan kewajiban negara selama periode tertentu. Fungsi utama APBN adalah sebagai alat untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta sebagai instrumen untuk memantau kemampuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang telah diputuskan. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, kata APBN telah digunakan di Indonesia untuk menggambarkan tata kelola keuangan Negara yang teratur, sesuai, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Konsumsi

Kerangka kerja ekonomi makro yang penting adalah teori konsumsi Keynesian, yang diciptakan oleh John Maynard Keynes dan menekankan hubungan antara pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi. Teori ini mencakup banyak konsep penting yang memengaruhi perilaku konsumen. Keynes berpendapat bahwa tingkat pendapatan menentukan tingkat konsumsi. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat. Namun, Keynes juga memperkenalkan konsep propensi margin konsumsi, yang berarti bahwa peningkatan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan konsumsi. Ini berarti bahwa sebagian pendapatan tambahan akan disimpan.

Investasi

Investasi adalah suatu proses menempatkan uang ke dalam aset atau proyek yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai di masa depan. Investasi dapat berarti menanamkan uang dalam bentuk modal, properti, saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan modal atau menghasilkan penghasilan pasif di masa yang akan datang. Dalam mengambil keputusan investasi, faktor-faktor seperti periode waktu, tingkat inflasi yang diharapkan, dan ketidakpastian masa depan harus dipertimbangkan.

Tingkat pendapatan individu atau perusahaan, tingkat suku bunga, dan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan adalah beberapa faktor yang memengaruhi keputusan untuk melakukan investasi; peningkatan pendapatan dapat mendorong peningkatan investasi, sedangkan tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi minat untuk berinvestasi karena biaya pinjaman yang lebih mahal.

METHOD

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode literatur. Studi literatur merupakan metode dalam penelitian yang mencakup pengumpulan, analisis, serta penggabungan informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam kerangka laporan mini riset ini, studi literatur dimanfaatkan untuk mengeksplorasi pengaruh kebijakan fiskal terhadap perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang penting dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti buku, jurnal ilmiah, laporan riset sebelumnya, artikel berita, serta dokumen resmi dari pemerintah. Sumber data yang digunakan mencakup karya-karya dari para ekonom, laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan lembaga penelitian lainnya.

Sedangkan dalam analisis data dilakukan dengan menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, tren, dan hubungan di antara variabel yang sedang diteliti. Penekanan analisis berada pada pengaruh kebijakan fiskal terhadap indikator-indikator ekonomi seperti investasi, konsumsi, belanja pemerintah, defisit anggaran, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun sintesis informasi dengan mengorganisir hasil-hasil dari analisis data menjadi narasi yang teratur dan masuk akal dan mengintegrasikan temuan-

temuan dari penelitian sebelumnya dengan data terbaru untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang diteliti.

Kontekstualisasi temuan dengan menempatkan hasil temuan dalam konteks situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Dengan mengaitkan hasil analisis dengan kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah serta kemungkinan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta kesimpulan dan rekomendasi dilakukan dengan menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian dari studi literatur. Dan memberikan saran untuk kebijakan fiskal yang efisien dan berkelanjutan dalam mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia. Dengan mengaplikasikan metode studi literatur, laporan mini riset ini mampu menyelidiki dan menganalisis informasi dari banyak sumber untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2024.

RESULTS AND DISCUSSION

Salah satu alat utama yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengatur perekonomian bangsa adalah kebijakan fiskal, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menetapkan "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" sebagai tema kebijakan fiskal pada tahun 2024. Fokus kebijakan tersebut meliputi pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, optimalisasi pendapatan negara tanpa mengganggu iklim investasi, dan peningkatan kualitas belanja negara untuk mendukung reformasi struktural dan menghadapi ketidakpastian global. Selain itu, pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan konsisten, dan pembiayaan non-utang dioptimalkan.

Seluruh sektor usaha di Indonesia mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024 dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut yaitu

5,03 %, pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 5,05 %, dan masih di bawah target APBN 2024 sebesar 5,2 %. Industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi memberikan kontribusi terbesar.

Analisis pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2024 menunjukkan bahwa belanja pemerintah, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia, memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan

penerimaan pajak, belanja barang, dan subsidi juga berkorelasi positif dengan pertumbuhan, sementara peningkatan utang luar negeri dan belanja pegawai justru berdampak negatif. Namun, target pertumbuhan ekonomi gagal dicapai karena kebijakan fiskal yang cenderung ketat dan kenaikan suku bunga acuan tahun 2024 yang menekan daya beli orang-orang di kelas menengah ke bawah.

Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan tetap menjadi prioritas utama. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan dan perlindungan sosial. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan di kisaran 5% menunjukkan adanya masalah struktural yang belum terselesaikan, seperti ketergantungan pada konsumsi rumah tangga dan diversifikasi sektor ekonomi yang belum optimal. Meskipun pengetatan fiskal dan moneter, seperti kenaikan suku bunga dan tarif PPN, membatasi kemampuan ekonomi untuk berkembang. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2024 berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada level moderat, tetapi belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun belanja pemerintah yang berpusat pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah terbukti menghasilkan hasil yang baik, kebijakan pengetatan fiskal dan tekanan dari luar menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas belanja negara dan reformasi fiskal yang berkelanjutan masih sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif di masa mendatang.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu alat terpenting yang digunakan pemerintah untuk mengelola ekonomi adalah kebijakan fiskal, yang mencakup peraturan pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesetaraan pendapatan.

Manik et al. (2024) menemukan bahwa kebijakan fiskal Indonesia berdampak besar pada permintaan agregat. Selain meningkatkan konsumsi dan investasi dalam negeri, kebijakan ini juga membantu menjaga kestabilan ekonomi saat terjadi gangguan dari luar. Studi mereka menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan dengan benar dapat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Handoko et al. (2023) menekankan bahwa kebijakan fiskal dan moneter harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa penerapan kebijakan yang tepat dapat mencegah inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kerja sama ini sangat penting dalam konteks ekonomi global yang semakin bersatu.

Di era digital, kebijakan fiskal seperti mengenakan cukai pada permainan digital dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang fleksibel terhadap kemajuan teknologi dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi negara.

Kebijakan moneter yang tepat harus diikuti oleh kebijakan fiskal yang efektif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi. Metode ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara instrumen kebijakan ekonomi yang berbeda sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peningkatan belanja modal dan pengurangan defisit anggaran adalah kebijakan fiskal terkait APBN yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini meneliti kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa kejayaan Islam, seperti Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang adil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga memberikan perspektif historis tentang pentingnya keadilan dalam kebijakan fiskal untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Stabilitas Harga dan Inflasi

Kebijakan fiskal sangat penting untuk mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas harga, selain mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Abadal et al. (2014), kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengurangi fluktuasi harga komoditas, terutama di bidang pertanian, dengan memberikan subsidi dan insentif fiskal. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Selama beberapa dekade terakhir, kebijakan fiskal Indonesia telah berhasil mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas harga dengan mengatur belanja pemerintah dan penerimaan pajak, menunjukkan bahwa intervensi fiskal yang tepat dapat membantu

menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Oleh karena itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menghindari tekanan inflasi yang berlebihan.

Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Ali Bin Abi Thalib, penerapan kebijakan fiskal yang adil dan efektif bisa membantu mengendalikan inflasi serta mempertahankan stabilitas harga melalui distribusi pendapatan yang seimbang. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dalam kebijakan fiskal turut berkontribusi pada kestabilan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bukan zakat yang diterapkan oleh Khalifah Umar Bin Khattab bisa membantu menstabilkan inflasi dan menjaga harga. Kebijakan fiskal yang tepat juga dapat mendukung pengelolaan ekonomi yang baik.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting. Metode ini menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan integrasi kebijakan ekonomi yang menyeluruh. Metode ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang efektif dapat digunakan dalam berbagai kondisi untuk mencapai kestabilan ekonomi, karena keterkaitan kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia menegaskan perlunya pengelolaan anggaran yang efisien demi menjaga kestabilan ekonomi.

Strategi Kebijakan Jangka Pendek Menyikapi Tantangan dan Membangun Fondasi Transformasi Ekonomi

Kebijakan fiskal jangka pendek bertujuan untuk menangani tantangan mendesak sekaligus menciptakan dasar yang kuat untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Empat elemen utama adalah fokus utama pemerintah Indonesia: penghapusan kemiskinan ekstrem segera, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penghapusan kemiskinan ekstrem adalah prioritas utama, dan targetnya adalah selesai pada tahun 2024. Menurut Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 2022, pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem—yakni mereka yang pengeluarannya di bawah 1,9 USD per hari (sekitar Rp322.170 per bulan). Pekerjaan ini terus menunjukkan hasil yang baik. Jumlah kemiskinan ekstrem berhasil berkurang dari tahun 2014 hingga 2022,

dengan penurunan rata-rata sebesar 12,64%. Namun, untuk mencapai target tersebut, langkah-langkah tambahan diperlukan.

2. Akselerasi Penurunan Stunting

Penurunan prevalensi stunting menjadi fokus kedua, dengan target 14% pada tahun 2024. Perbaikan lebih lanjut diperlukan meskipun prevalensi stunting telah menurun selama sepuluh tahun terakhir. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak dapat lagi menjalankan program seperti biasa. Akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, kurangnya asupan gizi yang memadai, dan ketersediaan air bersih adalah penyebab utama stunting di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan infrastruktur kesehatan dan meningkatkan akses pada daging, telur, dan susu yang sehat untuk ibu hamil dan anak-anak.

3. Pengendalian Inflasi dan Menjaga Stabilitas Ekonomi

Karena ketidakstabilan global yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina yang mengganggu perdagangan internasional, mengendalikan inflasi menjadi tantangan tersendiri. Tekanan pada inflasi global disebabkan oleh kenaikan harga komoditas internasional, tetapi Indonesia berhasil mengurangi sebagian dari efeknya. Daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global ditunjukkan oleh kinerja ekonomi yang konsisten, dengan pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun 2022. Kebijakan subsidi energi dan kompensasi untuk BBM adalah salah satu langkah penting dalam mencegah inflasi, dan dimaksudkan untuk mengurangi dampak perubahan harga minyak di seluruh dunia terhadap harga domestik. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi tekanan inflasi dari harga yang diatur pemerintah.

4. Peningkatan Investasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah terus mendorong penanaman modal yang lebih besar diberbagai industri, terutama energi dan pertambangan, karena investasi sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Empat strategi utama akan menjadi fokus kebijakan fiskal untuk tahun 2024: (i) memberikan insentif perpajakan untuk sektor-sektor prioritas, seperti cuti pajak, tax allowance, dan super deduction; (ii) meningkatkan kenyamanan berbisnis dan kepastian hukum, termasuk menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja; (iii) mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung investasi; dan (iv) meningkatkan kualitas sumber daymanusia. Pemerintah berharap dapat menarik investasi melalui

penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beragam insentif.

Empat pilar utama ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Kebijakan fiskal sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara, termasuk Indonesia. Studi telah melihat bagaimana berbagai kebijakan fiskal memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal pemerintah baik positif maupun negatif.

1. Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Suryono dan Rusmin (2019), peningkatan biaya pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan jalan tol, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya akan mengurangi biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, dan meningkatkan lapangan kerja. Infrastruktur yang memadai juga dapat mendorong investasi domestik dan asing. Pada akhirnya, hasil yang menguntungkan ini meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

2. Peningkatan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Selain itu, bertambahnya penerimaan pajak oleh pemerintah bisa mendorong perkembangan ekonomi. Pajak yang diterima oleh pemerintahan memberi kesempatan untuk mendistribusikan anggaran ke bidang-bidang penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kebijakan perpajakan yang tidak efisien, seperti peningkatan pajak yang tidak memperhatikan daya beli masyarakat dan dampak inflasi, dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu panjang.

3. Pengurangan Subsidi BBM dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebaliknya, kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengurangan mendadak subsidi bahan bakar dan listrik pada tahun 2014

memberikan dampak buruk pada perekonomian. Penghilangan subsidi mengakibatkan kenaikan harga energi dan barang-barang pokok, yang pada akhirnya menurunkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut, yang selanjutnya menyebabkan turunnya konsumsi domestik, suatu elemen kunci dari pertumbuhan ekonomi.

4. Efektivitas Kebijakan Fiskal Jangka Panjang

Dalam studinya, Siregar (2017) melihat seberapa efektif kebijakan fiskal Indonesia dari tahun 2000 hingga 2015. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal yang berfokus pada pengeluaran pemerintah dan investasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan, seperti birokrasi yang tidak efisien dan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, yang mengurangi efektivitas kebijakan.

5. Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam dan Perdagangan

Selain kebijakan umum, beberapa kebijakan tertentu juga berdampak pada ekonomi, terutama di sektor migas dan perdagangan:

a. Pajak Ekspor Migas: Salah satu sumber pendapatan utama negara adalah pajak ekspor migas; namun, ketergantungan pada migas dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga energi global.

b. Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Dana Cadangan Migas (DCM) : Berkat adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah dan perusahaan minyak serta Dana Cadangan Migas, pengelolaan pendapatan dari sektor minyak dan gas dilakukan secara lebih teratur, sehingga menghasilkan pendapatan negara yang lebih stabil dan berkelanjutan.

c. Pengendalian Impor dan Tarif Bea Masuk: Tujuan dari kebijakan pengawasan impor dan tarif bea masuk adalah untuk melindungi sektor industri lokal serta mendorong perkembangan industri produksi di dalam negeri. Di samping itu, kebijakan ini juga mendorong substitusi impor dan mendukung pertumbuhan industri lokal.

Analisis Data Makroekonomi Tahun 2024

Untuk memperkuat kajian terhadap dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, berikut adalah hasil analisis berdasarkan data makroekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan Kemenkeu RI.

1. Peningkatan Belanja Negara dan Pertumbuhan Belanja negara meningkat sebesar 8,6% dari tahun sebelumnya, dengan alokasi terbesar pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan bantuan sosial. Meskipun terjadi peningkatan belanja, pertumbuhan PDB tetap stagnan di kisaran 5,03%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi alokasi anggaran menjadi tantangan utama.

2. Efek Kebijakan Subsidi energi (BBM dan listrik) meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Dampaknya, inflasi berhasil ditekan hingga 2,8%. Hal ini menunjukkan efektivitas subsidi dalam menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah di tengah tekanan global.

3. Kenaikan Pajak dan Investasi Peningkatan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada awal 2024 turut menekan konsumsi domestik pada kuartal I. Namun, insentif pajak pada sektor prioritas berhasil menjaga arus investasi masuk, terutama di sektor manufaktur dan energi terbarukan.

4. Ketergantungan terhadap Utang luar negeri meningkat 6,3% dibandingkan tahun 2023. Pembiayaan defisit masih mengandalkan instrumen utang, meskipun proporsinya mulai ditekan melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan sinergi APBN-APBD.

5. Peran Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penyumbang terbesar PDB dengan kontribusi lebih dari 5 %. Namun, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tertekan akibat kenaikan harga bahan pokok dan pajak konsumsi.

Interpretasi dan Implikasi Kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2024 relatif efektif dalam menjaga stabilitas harga dan fiskal, namun belum cukup kuat mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui 5,2%. Perlu reformasi struktural lebih lanjut, terutama pada efisiensi belanja dan diversifikasi penerimaan negara. Keseimbangan antara pengetatan fiskal dan stimulus perlu dijaga agar tidak menekan konsumsi dan investasi swasta.

CONCLUSION

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen paling penting bagi pemerintah dalam mengatur perekonomian. Kebijakan ini mencakup regulasi mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi,

mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Seluruh sektor usaha di Indonesia mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024 dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut yaitu 5,03 %, pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 5,05 %, dan masih di bawah target APBN 2024 sebesar 5,2 %. Industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi memberikan kontribusi terbesar.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2024 berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pada level moderat, tetapi belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun belanja pemerintah yang berpusat pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah terbukti menghasilkan hasil yang baik, kebijakan pengetatan fiskal dan tekanan dari luar menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas belanja negara dan reformasi fiskal yang berkelanjutan masih sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif di masa mendatang.

Kebijakan moneter yang tepat harus diikuti oleh kebijakan fiskal yang efektif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas ekonomi. Metode ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara instrumen kebijakan ekonomi yang berbeda sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peningkatan belanja modal dan pengurangan defisit anggaran adalah kebijakan fiskal terkait APBN yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting. Metode ini menunjukkan bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan integrasi kebijakan ekonomi yang menyeluruh.

Kebijakan fiskal jangka pendek dengan tujuan menangani tantangan mendesak sekaligus menciptakan dasar yang kuat untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dikenal sebagai Strategi Kebijakan Jangka Pendek Menyikapi Tantangan dan Membangun Fondasi Transformasi Ekonomi. Penghapusan kemiskinan ekstrem segera, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi adalah empat fokus utama pemerintah Indonesia.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang pertama Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi,

yang kedua Peningkatan Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi, ketiga Pengurangan Subsidi BBM dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, keempat Efektivitas Kebijakan Fiskal Jangka Panjang dan yang kelima Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam dan Perdagangan.

Interpretasi dan Implikasi Kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2024 relatif efektif dalam menjaga stabilitas harga dan fiskal, namun belum cukup kuat mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui 5,2%. Perlu reformasi struktural lebih lanjut, terutama pada efisiensi belanja dan diversifikasi penerimaan negara. Keseimbangan antara pengetatan fiskal dan stimulus perlu dijaga agar tidak menekan konsumsi dan investasi swasta.

REFERENCES

- Badan Kebijakan Fiskal. (2025, Februari 11). Ekonomi Indonesia 2024: Pertumbuhan Stabil Berkat Kebijakan Tepat. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Darma, I. G. B. S., Alifh, M., Novarossi, P. A., Khulwani, D. Z., & Siswajanthi, F. (2024). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43462-43465
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024, Maret 26). Kajian Fiskal Regional DKI Jakarta Tahun 2024. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nurhayana, E., & Soebagiyo, D. (2023). Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 109-112.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 5-7.
- Wijayanti, D., & Aji, M. R. B. (2023). Analisis kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 379-382.